

BAB 2

GAMBARAN UMUM

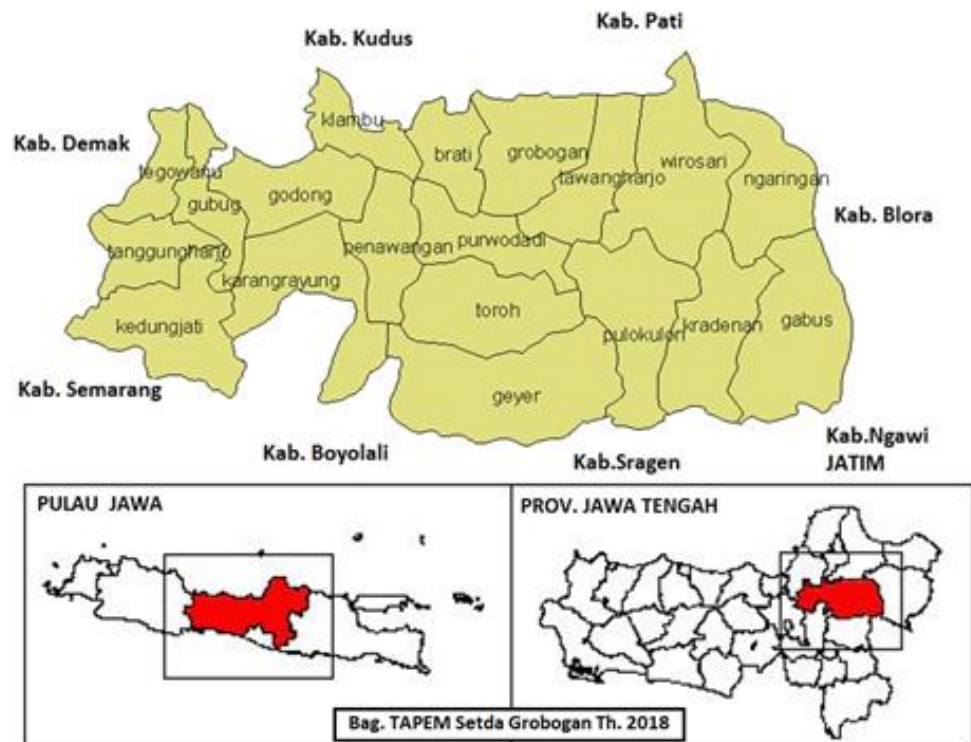
2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang pusat pemerintahannya berada di Purwodadi. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di antara 110°15' BT - 111 ° 25' BT dan di antara 7 ° LS - 30 ° LS. Dilihat dari tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Kondisi topografi rata-rata adalah datar, terutama di bagian tengah seluas 43.903,7 ha (22,22%) merupakan lahan landai dan agak curam, sedangkan yang berada di sebelah utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan).

Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Daerah dataran rendah :** Daerah yang berada pada ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengan antara 0 – 8 dan wilayah yang meliputi daerah tersebut yaitu: Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan dengan luas keseluruhan 22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- 2) Daerah perbukitan :** Daerah yang berada pada ketinggian antara 50 - 100 mdpl dengan kelerengan 80 – 150 dan wilayah yang meliputi daerah tersebut yaitu: Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara dengan luas : 61,72% dari luas wilayah keseluruhan.
- 3) Daerah dataran tinggi :** Daerah yang berada pada ketinggian 100 - 500 mdpl dengan kelerengan lebih dari 15 yang meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas sebesar 16,06%.

Gambar 2.1
Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah



Sumber : DPMPTSP Grobogan

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus,Pati,Blora
2. Sebelah Timur : Kabupaten Blora
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sragen, Ngawi, Boyolali dan Semarang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

Luas wilayah Kabupaten Grobogan adalah 1.975,86 km² dan secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan terbesar dalam 19 kecamatan dengan ibukota kabupaten di Purwodadi. Adapun persebaran luasan dan jarak di setiap kecamatan menuju ke pusat kota Purwodadi sebagai ibukota Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Dusun / Lingkungan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak ke Pusat Kota
1.	Kedungjati	12	76	130,34 Km ²	43
2.	Karangrayung	19	100	140,59 Km ²	29
3.	Penawangan	20	71	74,18 Km ²	9
4.	Toroh	16	118	119,31 Km ²	9
5.	Geyer	13	102	196,19 Km ²	16
6.	Pulokulon	13	112	133,65 Km ²	18
7.	Kradenan	14	79	107,74 Km ²	27
8.	Gabus	14	87	165,38 Km ²	40
9.	Ngaringan	12	78	116,72 Km ²	33
10.	Wirosari	14	85	154,30 Km ²	20
11.	Tawangharjo	10	58	83,60 Km ²	11
12.	Grobogan	12	52	104,56 Km ²	6
13.	Purwodadi	17	104	77,65 Km ²	0
14.	Brati	9	51	54,90 Km ²	12
15.	Klambu	9	44	46,56 Km ²	20
16.	Godong	28	86	86,78 Km ²	18
17.	Gubug	21	62	71,11 Km ²	30
18.	Tegowanu	18	54	51,67 Km ²	37
19.	Tanggunharjo	9	31	60,64 Km ²	42
Jumlah		280	1.451	1.975,86	

Sumber : Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan Tahun 2010

Dari paparan tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat beberapa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar hingga terkecil dan juga terdapat wilayah kecamatan yang memiliki jarak terjauh hingga terdekat untuk ke pusat kota Purwodadi yang merupakan

ibukota Kabupaten Grobogan dimana menjadi pusat tempat pelayanan administrasi daerah. Wilayah Kabupaten Grobogan sendiri memiliki luas 1.975,86 km² atau 197.586,42 ha yang terdiri dari :

1. Tanah Sawah : 63.955 ha
2. Tanah Bukan Sawah : 133.631 ha

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Geyer, dengan luas 196,19 km² (9,9%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Klambu, dengan luas wilayah 46,56 km² (2,2%). Selain itu terdapat 15 kecamatan yang memiliki jarak tempuh cukup jauh untuk ke pusat kota Purwodadi, kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Kedungjati memiliki jarak 43 km, Kecamatan Karangrayung memiliki jarak 29 km, Kecamatan Geyer memiliki jarak 16 km, Kecamatan Pulokulon memiliki jarak 18 km, Kecamatan Kradenan memiliki jarak 27 km, Kecamatan Gabus memiliki jarak 40 km, Kecamatan Ngaringan memiliki jarak 33 km, Kecamatan Wirosari memiliki jarak 20 km, Kecamatan Tawangharjo memiliki jarak 11 km, Kecamatan Brati memiliki jarak 12 km, Kecamatan Klambu memiliki jarak 20 km, Kecamatan Godong memiliki jarak 18 km, Kecamatan Gubug memiliki jarak 30, Kecamatan Tegowanu memiliki jarak 37 km dan Kecamatan Tanggungharjo memiliki jarak 42 km. Terdapat juga faktor kondisi jalan di setiap kecamatan yang mempengaruhi jarak dan waktu untuk menuju ke pusat kota Purwodadi.

2.2. Kondisi Demografi Kabupaten Grobogan

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I 2024, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 1.517.987 jiwa. Dari jumlah tersebut, 763.500 jiwa adalah laki-laki (50,30%) dan 754.487 jiwa adalah perempuan (49,70%) Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 1,96%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat

0,41%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, 978,07 ribu atau sekitar 64,43% penduduk di Kabupaten Grobogan adalah kelompok produktif yang berusia 15-59 tahun. Adapun 21,34% dari total penduduk atau sekitar 323,93 ribu adalah anak-anak (usia 0-14 tahun) dan 14,23% lainnya adalah penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun.

Berikut ini jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Grobogan pada Juni 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Grobogan

No	Umur	Jumlah penduduk	Presentase
1	0-4 Tahun	91,730 jiwa	6,04%
2	5-9 Tahun	116,150 jiwa	7,65%
3	10-14 Tahun	116,050 jiwa	7,64%
4	15-19 Tahun	113,450 jiwa	7,47%
5	20-24 Tahun	116,640 jiwa	7,68%
6	25-29 Tahun	117,920 jiwa	7,77%
7	30-34 Tahun	115,370 jiwa	7,6%
8	35-39 Tahun	112,510 jiwa	7,41%
9	40-44 Tahun	110,880 jiwa	7,3%
10	45-49 Tahun	103,780 jiwa	6,84%
11	50-54 Tahun	91,930 jiwa	6,06%
12	55-59 Tahun	95,590 jiwa	6,3%
13	60-64 Tahun	81,510 jiwa	5,37%
14	65-69 Tahun	56,650 jiwa	3,73%
15	70-74 Tahun	35,910 jiwa	2,37%
16	75+	41,910 jiwa	2,76%

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (Grobogan dalam Angka Tahun 2024)

Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah sekitar 2.023,849 km², yang menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 750 jiwa/km². Ini berarti terdapat sekitar 750 orang di setiap kilometer persegi wilayah kabupaten tersebut, akan tetapi Kabupaten Grobogan memiliki sebaran penduduk yang

tidak merata sebagaimana wilayah eks-kawedanan Purwodadi, yang meliputi Kecamatan Purwodadi, Geyer, dan Toroh, merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 334.723 jiwa atau sekitar 22,05% dari total populasi. Sebaliknya, eks-kawedanan Grobogan (Kecamatan Grobogan, Brati, dan Klambu) memiliki jumlah penduduk terendah dengan total 174.814 jiwa atau sekitar 11,52%. Pada struktur usia penduduk Kabupaten Grobogan dalam hal kelompok umur, data menunjukkan bahwa Laki-laki dengan rentang umur 25-29 tahun merupakan kelompok terbesar. Perempuan dengan rentang umur 20-24 tahun juga menjadi kelompok terbesar di antara wanita. Hal ini mencerminkan bahwa populasi muda mendominasi struktur demografi di Kabupaten Grobogan. Secara keseluruhan, Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan populasi yang berkelanjutan.

2.3. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan

Di dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat Visi dan Misi yang terbentuknya untuk menuntun dalam menuju kepemimpinan yang sukses. Sebagai bagian dari perencanaan strategis, visi dan misi harus dibuat sungguh-sungguh karena di dalamnya terkandung Gambaran mengenai masa depan yang diidamkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Visi berfungsi sebagai suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi berisi poin-poin penting tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya visi misi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara konsisten dan terus bergerak terus maju ke depan.

Gambar 2.2
Logo Kabupaten Grobogan



Sumber : Grobogan.go.id

VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (clarity of direction) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya
Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.) Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

2.) Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun competitive advantage (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

3.) Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

4.) Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta

peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2.) Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana. Pembangunan daerah dan pengembangan wilayah dimulai dengan perwujudan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang ada di Kabupaten Grobogan.

3.) Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing. Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 V 3 potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4.) Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian

dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government.

5.) Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

2.4. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penanaman modal serta pelayanan perizinan di daerah tersebut. DPMPTSP berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Lokasi dan Kontak: DPMPTSP terletak di Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi, Grobogan. Kontak: 0292-421193, Email: dpmptsp@grobogan.go.id.

2.4.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan

VISI

Visi DPMPTSP adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan dalam bidang penanaman modal dan perizinan.

MISI

Mencakup peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan proses perizinan, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

2.4.2. Struktur Jabatan Organisasi

Tabel 2.3
Struktur Jabatan DPMPTSP Kabupaten Grobogan

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Kepala Dinas	DPMPTSP
2	Sekretaris	Sekretariat
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat
4	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretariat
5	Bendahara	Sekretariat
6	Analisis Keuangan	Sekretariat
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat
8	Operator Komputer	Sekretariat & Bidang Pelayanan
9	Kabid Pelayanan	Bidang Pelayanan
10	Penata Perizinan Ahli Muda	Bidang Pelayanan
11	Analisis Dokumen Perizinan	Bidang Pelayanan
12	Tenaga Administrasi	Sekretariat

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Grobogan (2024)

2.4.3. Tugas DPMPTSP Kabupaten Grobogan

DPMPTSP memiliki tugas dalam memberikan pelayanan perizinan secara terpadu, memfasilitasi investasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan.

Dinas ini juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan terkait penanaman modal dan pelayanan publik di Kabupaten Grobogan.

Layanan yang Disediakan:

1. Berbagai jenis izin usaha, termasuk izin untuk sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor lainnya.

2. Layanan konsultasi bagi investor dan pelaku usaha mengenai regulasi dan prosedur perizinan.
3. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah untuk kemudahan akses masyarakat.

2.4.4. Fungsi DPMPTSP Kabupaten Grobogan

1. **Pelayanan Perizinan:** DPMPTSP bertugas memberikan layanan perizinan yang terintegrasi untuk berbagai sektor usaha, termasuk perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perindustrian, serta sektor lainnya. Ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin yang diperlukan.
2. **Fasilitasi Penanaman Modal:** Dinas ini berperan dalam mempromosikan dan memfasilitasi investasi di Kabupaten Grobogan. Mereka menyediakan informasi yang diperlukan bagi investor dan membantu dalam proses pengajuan izin serta pelaksanaan investasi.
3. **Pengawasan dan Evaluasi:** DPMPTSP juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan, memastikan bahwa semua kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Penyuluhan dan Edukasi:** Dinas ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan terkait investasi dan perizinan. Ini termasuk sosialisasi tentang hak dan kewajiban pelaku usaha.
5. **Inovasi Pelayanan:** DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik, termasuk penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan. Ini mencakup penggunaan aplikasi online untuk pengajuan izin dan sistem informasi pelayanan publik.
6. **Koordinasi Antarlembaga:** DPMPTSP berfungsi sebagai penghubung antara berbagai instansi pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat dalam hal penanaman modal dan pelayanan publik.

2.4.5. Inovasi Pelayanan

DPMPTSP telah menerapkan sistem digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini termasuk penggunaan aplikasi online untuk pengajuan izin dan pelaporan. DPMPTSP juga menghadirkan pelayanan semua instansi dalam satu atap yang diberi nama Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan tujuan aktif berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya serta lembaga swasta untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Grobogan serta mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Grobogan. DPMPTSP Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang berkelanjutan.

2.5. Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan adalah inisiatif pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai penanggung jawab. Tujuan di bedirikannya MPP adalah untuk menyediakan semua layanan publik dari instansi pemerintah dan swasta secara terpadu dan efisien dalam satu gedung. MPP ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung iklim investasi yang lebih baik.

Gambar 2.3

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan



Sumber : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan 2022

MPP Grobogan menawarkan 144 jenis layanan dari 33 instansi, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Layanan ini mencakup perizinan usaha, administrasi kependudukan, tenaga kerja, dan layanan kesehatan. Inovasi Digital Pada tahun 2023, MPP Grobogan menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan MPP Digital. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik secara online menggunakan satu akun dan mengunggah dokumen persyaratan hanya sekali. Teknologi seperti Face Recognition juga digunakan untuk verifikasi identitas pengguna.

2.5.1. Visi dan Misi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan

VISI

“Menjadi pusat pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, mudah, dan berkualitas, serta mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan dari pemerintah dan instansi terkait”

MISI

Sedangkan Misi dari Misi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam setiap proses pelayanan.

2. Penyederhanaan Proses Administrasi: Mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah dan swasta dalam satu lokasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

3. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Melakukan survei dan evaluasi secara berkala untuk memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan umpan balik yang diterima.

4. Pengembangan Sistem Informasi: Menerapkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, termasuk sistem antrian dan pengajuan izin secara online.

5. Koordinasi Antarlembaga: Membangun sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memastikan pelayanan yang terintegrasi dan berkualitas.

Dengan visi dan misi ini, MPP Grobogan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

2.5.2. Instansi yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan

Beberapa Instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik yang terpadu dan Terintegrasi, yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Purwodadi
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Peternakan dan Perikanan
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
13. Pengadilan Negeri
14. Pengadilan Agama
15. Kejaksaan Negeri
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
17. BPJS Ketenagakerjaan
18. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
19. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
20. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
21. Notaris
22. Kantor Pos
23. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
24. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng
25. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)
26. BRI Syariah
27. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun)
28. Badan Pusat Statistik (BPS)
29. Kementerian Agama (Kemenag)
30. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
31. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
32. Kementerian Pertanian
33. Kementerian Koperasi dan UKM

2.5.3. Fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan

Fasilitas MPP dilengkapi dengan beberapa ruang pelayanan yang nyaman dan modern, serta komputer layanan mandiri yang didukung oleh petugas siap membantu. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan

dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif.

Berikut Fasilitas yang terdapat di MPP Kabupaten Grobogan :

1. Ruang Laktasi

Ruang laktasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai fasilitas yang menyediakan privasi dan kenyamanan bagi ibu menyusui.

2. Kantin & Mushola

Kantin di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan memiliki beberapa kegunaan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pegawai maupun masyarakat dengan menyediakan tempat untuk istirahat, sholat dan makan serta menjual berbagai jenis makanan dan snack kemudian juga menyediakan aneka peralatan kebutuhan administrasi seperti fotocopy, printing dan peralatan tulis.

3. Pojok Baca

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan menyediakan fasilitas perpustakaan/library untuk pengunjung MPP, fasilitas ini diharapkan dapat menghilangkan kebosanan ketika menunggu antrian pelayanan di MPP Kabupaten Grobogan.

4. Layanan Mandiri

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Grobogan menyediakan fasilitas layanan mandiri, dimana masyarakat dapat menggunakan perangkat komputer yang disediakan untuk mengakses atau melakukan permohonan perijinan secara online.

5. Playground bermain anak

Fasilitas bagi masyarakat khususnya yang mengajak anak-anak kecil ketika mengurus administrasi atau pelayanan lain, untuk dapat memanfaatkan ruang bermain, sembari menunggu mendapatkan pelayanan, selain fungsi utama sebagai fasilitas masyarakat, ruang bermain anak sebagai pendukung program kota layak anak dimana salah satu poin pentingnya adalah anak-anak tempat pelayanan publik.

